

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 307 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Setwan yang selanjutnya disebut Renstra Setwan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Setwan yang selanjutnya disebut Renja Setwan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA SETWAN

Pasal 2

Dokumen Renstra Setwan merupakan dokumen perencanaan strategis Setwan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Setwan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Setwan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Setwan bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Setwan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Setwan dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Setwan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Setwan;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Setwan;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan

f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Setwan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA SETWAN

Pasal 4

(1) Renstra Setwan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Setwan dalam menyusun Renja Setwan.

(2) Renstra Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Setwan paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Setwan; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Setwan.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Setwan Tahun 2025-2029;
   2. strategi Setwan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Setwan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Setwan; dan

4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA SETWAN

Pasal 5

(1) Setwan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Setwan dan evaluasi hasil Renstra Setwan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Setwan terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Setwan.

(3) Sekretariat DPRD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Setwan.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA SETWAN

Pasal 6

Perubahan Renstra Setwan dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Setwan mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra Setwan dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Setwan, maka Renstra Setwan dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Setwan Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Setwan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Setwan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 307

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 307 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR.....TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* menjadi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan organisasi sektor publik. *Good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah, rakyat, dan swasta/bisnis.

Semangat Reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan pemerintahan yang bersih *(Clean Government).*

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknik-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknik-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Bandung khususnya yang terkait dengan Misi Ketiga dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Dalam dokumen hasil

rumusan RPJMD Tahun 2025-2029 memuat Visi yaitu " Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" sedangkan Misinya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
5. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum.

Masyarakat juga menuntut pemerintahan untuk memberikan perhatian yang serius dalam menentukan kebijakan utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar yaitu rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menuju terciptanya pemerintahan yang mampu menyediakan kualitas kinerja aparatur dan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Untuk terselenggaranya *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya mekanisme untuk aturan akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi pada setiap instansi pemerintah, memperkuat peran dan kapasitas instansi publik serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksaaan kegiatan pada setiap bagian, masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang mana mengutamakan pelayanan administratif dan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik.

Transparansi merupakan fenomena dimana setiap orang atau kelompok berhak mengetahui setiap proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kebijakan publik secara aktif terhadap informasi berkaitan dengan proses penyusunan produk hukum yang menyangkut kebijakan publik, informasi jadwal dan pelaksanaan rapat dan risalah rapat DPRD.

Partisipasi adalah partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berlandaskan pada ketaatan norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, Sekretariat DPRD mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung untuk ikut berpatisipasi aktif secara terbuka dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, kunjungan kerja dalam daerah, atau bahkan menerima aspirasi masyarakat secara perorangan atau kelompok baik berupa pengaduan atau unjuk rasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah selanjutnya akan ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah kemudian akan dirumuskan ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah tersebut akan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja

Perangkat Daerah akan ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan , Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung untuk melaksanakan mandat dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber daya lain, serta mencakup langkah-langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan, potensi,

peluang dan kendala yang ada bila mungkin timbul.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 59).

1.3. Maksud danTujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 dimaksudkan:

1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai.
3. Dipergunakan sebagai tolak ukur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan Perangkat Daerah Renstra 2025-2029 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
2. Untuk pedoman cara kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

BAB II : Gambaran Pelayanan, Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, yang memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD, dan target kinerja;

BAB V : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

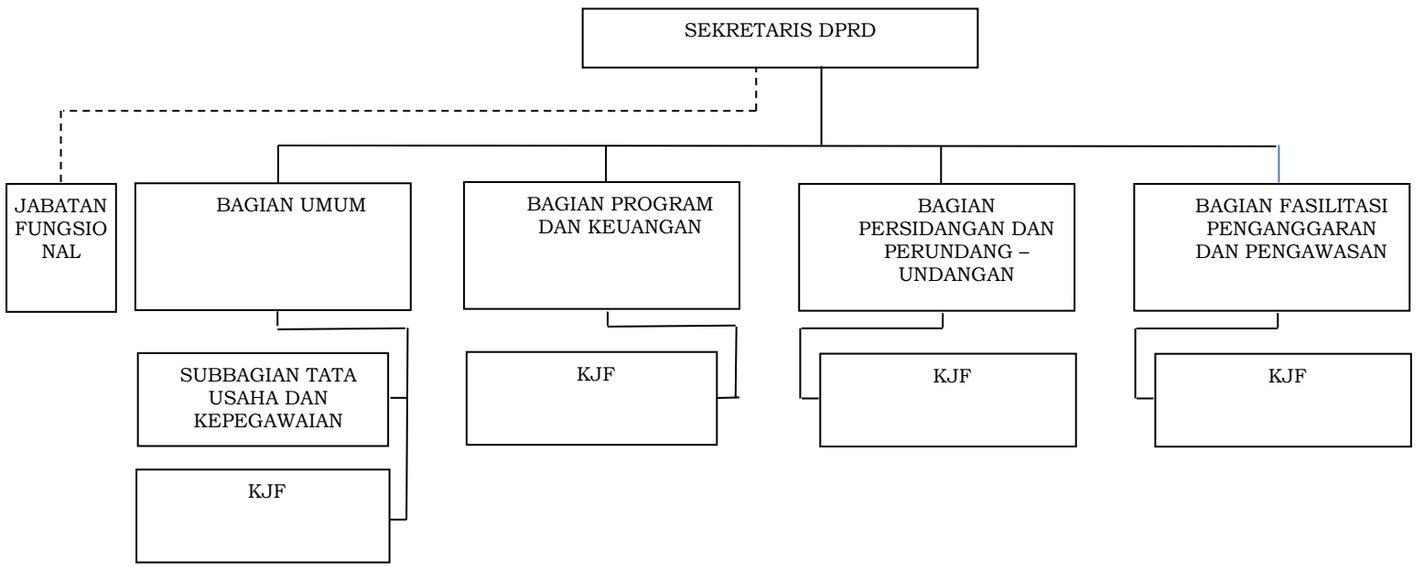
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, keberadaan Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DPRD memiliki peranan yang sangat penting. Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung berfungsi sebagai unsur pelayanan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, baik dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, penting untuk memahami kondisi objektif Perangkat Daerah, termasuk pelayanan, permasalahan yang dihadapi, serta isu strategis yang perlu mendapat perhatian kedepan. Gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD menjadi dasar untuk merumuskan arah kebijakan strategis lima tahunan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung digambarkan pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung



Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Dalam melaksakaan tugasnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang membawahi Bagian Umum, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Bagian-bagian tersebut membawahi beberapa Kepala Sub Bagian yang susunannya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Berikut penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan:

1. Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:
   Mempunyai tugas pokok:
   a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
   b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a) Sekretaris DPRD menyelenggarakan Fungsi:
      (1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
      (2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
      (3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
      (4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
2. Bagian Umum,
   a. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
   b. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaiannya.
   c. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
      (1) penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, kelembagaan serta

ketatalaksanaannya;

(2) pengkoordinasian urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

(3) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;dan

(4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Umum, membawahkan :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Program dan Keuangan
   a. Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
   b. Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program, dan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan.
   c. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
      (1) perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Bagian;
      (2) penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas bagian;
      (3) penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi sebagai bahan sistem pendukung keputusan dan perumusan kebijakan pimpinan; dan
      (4) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan capaian kinerja bagian.

   Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:

   - Kelompok Jabatan Fungsional .

4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

a. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
b. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan hukum dan perundang-undangan.
c. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
   (1) perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup bagian perundang-undangan;
   (2) penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lingkup tugas bagian perundang-undangan;
   (3) penyelenggaraan pelayanan staf melalui penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi dalam pelaksanaan fungsi perundang-undangan; dan
   (4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja bagian perundang-undangan.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :

- Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
   a. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
   b. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.
   c. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
      (1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, meliputi fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, risalah dan peningkatan kapasitas

DPRD;

(2) penyelenggaraan rencana kerja bidang fasilitasi rapat dan risalah kegiatan alat kelengkapan DPRD, meliputi fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, risalah dan peningkatan kapasitas DPRD;

(3) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

(4) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang fasilitasi rapat dan risalah kegiatan alat kelengkapan DPRD, meliputi fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, risalah dan peningkatan kapasitas DPRD.

Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan :

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh bagian, dan kelompok jabatan fungsional menurut lingkup tugasnya masing-masing;
3. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada staf/ jabatan fungsional umum.

2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan

Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat/Golongan. Komposisi sumber daya aparatur tersebut menjadi aset penting bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung karena menjadi potensi utama yang terdapat di dalamnya untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan atau urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sumber daya aparatur tersebut perlu diklasifikasikan agar dapat diketahui gambaran potensi sumber daya aparatur secara komprehensif berdasarkan beberapa klasfikasi, yang mana jumlah personil di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebanyak 48 orang.

Untuk mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD jumlah personil sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Jumlah		Ket.
					Pria	Wanita	
1.	Sekretaris	Pembina Utama Muda	1	S2	1	-	
2.	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	S2	-	2	
				S1	-	-	
		Pembina (IV/a)	2	S2	1	-	
				S1	1	-	
3.	Kelompok Jabatan Fungsional, dan structural,	Pembina (IV/a)	1	S2	-		
				S1	-		
		Penata Tk.I (III/d)	5	S2	-		
				S1	2	3	
		Penata (III/c)	1	S2	-		
				S1	1		
		Penata Muda Tk. I (III/b)	-	S1	-		
4.	Staf	Penata (III/c)	-	S1	1	1	
		Penata Muda Tk.I (III/b)	5	S1	5	4	
				D3	-		
		Penata Muda (III/a)	7	S1	3	4	
				D3	-	-	

No	Jabatan Struktural	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Jumlah		Ket.
					Pria	Wanita	
			11	SLTA	7	11	
		Pengatur Tk. I (II/d)	1	SLTA	1	-	
		Pengatur (II/c)	2	SLTA	2	-	
		Pengatur Muda (II/a)	1	SLTA	1	-	
		Juru Tingkat I I/d	1	SMP	1	-	
5.	PPPK	P3K-9	5	S1	2	3	
		P3K-7	2	D3	1	1	
		P3K-5	1	SLTA	1		
Jumlah			51		51		

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Adapun Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang lainnya sangat vital dalam melaksanakan tugas utamanya Kendaraan Roda 4 (empat), Kendaraan Roda 2 (dua), Meja dan Kursi, mesin ketik, Komputer, alat komunikasi (pesawat telepon) dan sarana yang lainnya.

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Sekretariat DPRD

Jenis Barang					
1.	Gedung DPRD	18.	TV	35.	Dispenser
2.	Mess DPRD	19.	CCTV	36.	Kompor gas
3.	Kendaraan Bermotor roda 4	20.	Telpon	37.	Alat Pemadam Kebakaran
4.	Kendaraan Bermotor roda 2	21.	Penghancur Kertas	38.	Lemari Kaca
5.	Komputer	22.	Filling Kabinet	39.	Papan tulis
6.	Laptop	23.	Almari besi	40.	Pana Board
7.	Note book	24.	Brankas	41.	Joglo

Jenis Barang					
8.	Proyektor	25.	Jam almari	42.	Papan Pengumuman
9.	Printer	26.	Sound System		
10.	Mesin Ketik	27.	*Mixer Sound*		
11.	Meja Kerja Pejabat & Staf	28.	*Handycam*		
12.	Meja Rapat	29.	*Camera Film* + tripod		
13.	Kursi Rapat	30.	*Camera Digital*		
14.	Kursi Lipat	31.	*Camera Digital SLR + Tele + Blitz*		
15.	Sofa	32.	HT		
16.	Rak Kayu	33.	*Audio Tape Real recorder*		
17.	AC	34.	*Video Cross Bar Switch*		

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.3.1 Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD yang dimaksudkan adalah hasil kerja Sekretariat DPRD secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.

Kinerja Sekretariat DPRD tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD

meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2.1.3.1 Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DPRD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				100	100	100	100	100	100	74.26	100	100	100	100	74.26	100	100	100	Bagian Garwas, Bagian PPUU dan Bagian Umum
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	82	100	100	100	100	82	100	100	100	Bagian Garwas
3	Nilai AKIP				65	66	67	68	74.7	65.69	66.42	67.5	74.7	80.1	101.06	100.63	100.74	109.9	107.22	Bagian Program dan Keuangan dan Bagian Umum
4	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				80	80	80	80	80	85.95	89.95	99.81	82.77	93.86	107.43	112.43	124.76	103.5	117.32	Bagian Umum

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat digambarkan bahwa selama periode Renstra Tahun 2021-2026 pencapaian kinerja Sekretariat DPRD terus mengalami perubahan. Pencapaian target indikator kinerja dalam hal persentase fasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD rata-rata rasio capaiaanya sebesar 94,85%. Untuk pencapaian kinerja dalam hal persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti rata-rata rasio capaiannya sebesar 96,4%. Sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja AKIP rata-rata rasio capaian kinerjanya sebesar 103,86%. Terakhir untuk pencapaian indikator kinerja persentase BMD dalam kondisi baik rata-rata rasio capaiannya sebesar 113,02%.

Dengan demikian, selama periode Renstra Tahun 2021-2026 capaian target indkator kinerja Sekretariat DPRD berada dalam kondisi baik, yang ditunjukkan dengan tercapainya sasaran indikator kinerja selama periode Renstra tersebut. Oleh karena itu, pencapaian kinerja yang telah berjalan baik selama periode Renstra Tahun 2021-2026 harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya, agar Sekretariat DPRD dapat menjalankan peran dan fungsi organisasinya dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD terus lebih baik.

2.1.3.4 Penyajian hasil evaluasi capaian SDG’s Tahun 2022-2024

Sekretariat DPRD mengampu pencapaian SDG’s terkait Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah yang merupakan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II. Berikut data anggota DPRD Kabupaten Bandung Periode 2024-2029, antara lain:

Tabel. 2.4

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung
Periode 2024-2029.

Partai Politik *Political Parties*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Gerindra	6	0	6
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	0	7
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	3	1	4
Partai Golongan Karya (Golkar)	9	0	9
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	3	12
Partai Demokrat	5	2	7
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	1	4
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	4	2	6
Kabupaten Bandung	46	9	55

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Adapun hasil pencapaian SDG's Sekretariat DPRD Tahun 2022-2024, antara lain:

Tabel 2.5

Rekapitulasi Hasil Monev SDG'S Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

No.	Tujuan/Goals	Indikator	Satuan Data Target	Data 2021 (Base Line)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
					Taget	Capaian	Status	Taget	Capaian	Status	Taget	Capaian	Status	
1.	TPB 5 (Kesetaraan Gender)	5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat. parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	12,96	12,96	16,36	Tercapai	12,96	16,37	Tercapai	12,96	16,37	Tercapai	
2.	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan	Persen	12.96	12.96	16.36	Tercapai	12.96	16.37	Tercapai	12.96	16.37	Tercapai	

No.	Tujuan/Goals	Indikator	Satuan Data Target	Data 2021 (Base Line)	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
					Taget	Capaian	Status	Taget	Capaian	Status	Taget	Capaian	Status	
		Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).												

Sumber: Data Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2024, 2025.

2.1.3.5 Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD pada Renstra Tahun 2026 yang mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan antara lain:

Tabel 2.6

Hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
										2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(17)		(18)		(19)	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	02	01			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP PD	70 Point	66	358,998,622,699	67 Poin	59,897,180,000	68 Poin	73,537,308,013	69 Poin	78,234,483,350	80.10 Poin	73,664,825,668	81 Poin	73,664,825,668	67	74,418,033,308	74.70	73,368,353,873	80.10	79,591,703,840		###		###		###
4	02	01	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	100	675,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	###	135,000,000	100	172,997,100	100	149,152,800	100	165,341,550		###		###		###
4	02	01	2	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	2 Dokumen	2	100,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	9,501,000	2	1,814,900	2	4,844,400	###	###	###	###	###	###
4	02	01	2	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,005,500	1	21,761,500	1	24,142,000	###	###	###	###	###	###
4	02	01	2	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	100,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	17,539,000	1	12,995,650	1	29,258,000	###	###	###	###	###	###

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	01	2	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	12,600,000	1	8,400,000	1	6,552,000	##########	########	########	########	########	########
4	02	01	2	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	100,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	14,850,000	1	10,800,000	1	11,418,400	100%	74%	########	54%	########	57%
4	02	01	2	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	125,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	4	92,388,000	1	92,231,750	1	85,378,750	400%	########	########	########	########	342%
4	02	01	2	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3	50,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	6,113,600	3	1,149,000	3	3,748,000	100%	61%	########	11%	########	37%
4	02	01	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	70	Point	70	51,112,521,274	100	8,799,197,000	100	10,813,956,738	100	10,471,958,800	100	10,513,704,368	###	10,513,704,368	100	8,394,870,537	100	8,477,663,775	100	9,501,628,299	100%	95%	########	78%	########	91%
4	02	01	2	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/Bulan	45	50,687,521,274	45	8,714,197,000	45	10,728,956,738	45	10,386,958,800	45	10,428,704,368	45	10,428,704,368	45	8,223,094,601	45	8,338,333,700	45	9,325,448,399	100%	94%	########	78%	########	90%
4	02	01	2	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	75,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	7,464,800	12	11,319,450	12	4,524,400	100%	50%	########	75%	########	30%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	01	2	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	150,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	76,868,500	2	65,016,250	2	80,963,600	100%	#####	#####	######	#####	270%
4	02	01	2	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	200,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	87,442,636	12	62,994,375	12	90,691,900	100%	#####	#####	######	#####	227%
4	02	01	2.1			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100	Persen	70	3,297,500,000	100	659,500,000	100	659,500,000	100	659,500,000	100	659,500,000	###	659,500,000	100	1,462,271,336	100	1,454,377,930	100	1,904,618,860	100%	#####	#####	221%	#####	289%
4	02	01	2.1	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	306	Paket	306	537,500,000	3	107,500,000	3	107,500,000	3	107,500,000	3	107,500,000	3	107,500,000				-	4	223,740,000	0%	0%	0%	0%	#####	208%
4	02	01	2.1	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	Orang	2	1,510,000,000	55	302,000,000	55	302,000,000	55	302,000,000	55	302,000,000	55	302,000,000	220	648,996,900	203	612,789,600	153	363,312,480	400%	#####	#####	######	#####	120%
4	02	01	2.1	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11	Orang	11	1,250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	8	813,274,436	79	841,588,330	80	1,317,566,380	53%	#####	#####	######	#####	527%
4	02	01	##			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%			8,571,600,000	100	1,719,400,000	100	1,719,400,000	100	1,694,000,000	100	1,719,400,000	###	1,719,400,000	100	5,277,415,341	100	3,605,523,025		4,470,427,456	100%	#####	#####	210%		264%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	01	###	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	Paket	18	150,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	16	30,000,000	7	25,449,250	9	30,497,800	16	29,805,998	44%	85%	56%	######	#####	99%
4	02	01	###	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84	Paket	84	1,000,000,000	69	200,000,000	69	200,000,000	69	200,000,000	69	200,000,000	69	200,000,000	97	3,092,599,250	44	2,039,898,195	69	2,723,934,975	141%	#####	64%	######	#####	######
4	02	01	###	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27	Paket	27	900,000,000	18	180,000,000	18	180,000,000	18	180,000,000	18	180,000,000	18	180,000,000	35	679,511,906	24	178,107,500	24	433,814,483	194%	#####	99%	#####	#####	241%
4	02	01	###	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	11	420,000,000	10	84,000,000	10	84,000,000	10	84,000,000	10	84,000,000	10	84,000,000	12	99,555,300	13	106,961,800	15	235,398,650	120%	#####	######	#####	#####	280%
4	02	01	###	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	18	1,250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	15	250,000,000	16	315,788,085	14	252,802,500	15	349,192,900	107%	#####	93%	######	#####	140%
4	02	01	###	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180	Dokumen	180	1,500,000,000	105	300,000,000	105	300,000,000	105	300,000,000	105	300,000,000	###	300,000,000	200	281,555,250	181	273,172,800	126	110,248,200	190%	#####	94%	#####	#####	37%
4	02	01	###	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	101,600,000	1	25,400,000	1	25,400,000	1	-	1	25,400,000	1	25,400,000		-					0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	02	01	###	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	2,250,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	450,000,000	12	559,042,000	12	574,389,000	12	465,806,000	100%	#####	#####	######	#####	104%
4	02	01	###	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	10	1,000,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	13	223,914,300	5	149,693,430	5	122,226,250	260%	#####	#####	75%	#####	61%
4	02	01	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	80	3,553,625,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	3,353,625,000	1	50,000,000	1	50,000,000	100	362,974,829	100	279,600,000	100	539,482,000	########	#####	#####	559%	#####	16%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
											2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	01	2.1	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit	-	3,303,625,000	-	-	-	-	-	3,303,625,000	-		-	-							0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	02	01	2.1	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			-		-		-		-		-						6	214,200,000	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	02	01	2.1	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2	250,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	5	362,974,829	3	279,600,000	5	325,282,000	250%	###	###	###	###	651%
4	02	01	##			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	70	10,064,373,250	100	2,354,912,000	100	1,657,972,000	100	2,735,545,250	100	1,657,972,000	###	1,657,972,000	100	2,153,893,519	100	2,384,857,015	100	3,499,319,618	100%	91%	###	144%		128%
4	02	01	###	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500 Laporan	4,500	100,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	13,453,000	12	5,530,000	12	9,490,000	100%	67%	###	28%	###	47%
4	02	01	###	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	1,770,673,050	12	338,942,000	12	338,942,000	12	414,905,050	12	338,942,000	12	338,942,000	12	249,542,880	12	297,914,530	12	354,442,698	100%	74%	###	88%	###	85%
4	02	01	###	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	8,193,700,200	12	1,995,970,000	12	1,299,030,000	12	2,300,640,200	12	1,299,030,000	12	1,299,030,000	12	1,890,897,639	12	2,081,412,485	12	3,135,386,920	100%	95%	###	###	###	136%
4	02	01	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	80%		5,690,860,000	80	1,142,372,000	80	1,142,372,000	80	1,121,372,000	80	1,142,372,000	80	1,142,372,000	80	1,364,492,532	80	1,117,317,680	80	2,817,551,325	100%	###	###	98%	###	251%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
											2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	01	2.1	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9	2,303,250,000	5	464,850,000	5	464,850,000	5	443,850,000	5 Unit	464,850,000	5	464,850,000	1	32,532,445	5	163,782,962			20%	7%	####	35%	0%	0%
4	02	01	2.1	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44	2,283,110,000	20	456,622,000	20	456,622,000	20	456,622,000	20 Unit	456,622,000	20	456,622,000	25	285,511,269	24	341,734,236	20	284,519,767	125%	63%	####	75%	####	62%
4	02	01	2.1	0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	7	75,000,000	4	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50 Unit	15,000,000	4	15,000,000		-			55	74,328,930	0%	0%	0%	0%	####	496%
4	02	01	2.1	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5	727,000,000	4	145,400,000	4	145,400,000	4	145,400,000	64 Unit	145,400,000	4	145,400,000	18	180,927,436	136	150,098,860	126	125,249,100	450%	####	####	###	####	86%
4	02	01	2.1	0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3	200,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	-	3 Unit	50,000,000	3	50,000,000	3	220,960,590	3	257,626,624	5	2,255,096,203	100%	####	####	###	####	0%
4	02	01	2.1	0010		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit			-	-	1	10,500,000	1	50,000,000	0 Unit		-								0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	02	01	2.1	0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3	42,000,000	1	10,500,000	-	-	-	10,500,000	1 Unit	10,500,000	1	10,500,000	1	644,560,792	5	204,074,998	6	78,357,325	100%	####	0%	0%	0%	746%
4	02	01	##			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	100 Persen	70	269,334,148,175	100	43,697,000,000	100	56,019,308,275	100	56,723,683,300	100	56,447,078,300	###	56,447,078,300	100	54,064,840,709	100	54,926,936,158	100	55,236,489,982	100%	####	####	98%	####	97%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	01	2.15	0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	Orang/Bulan	12	265,655,793,175	55	43,016,650,000	55	55,338,958,275	55	55,766,728,300	55	55,766,728,300	55	55,766,728,300	55	53,665,333,137	55	54,264,116,158	55	54,351,661,232	100%	######	######	98%	######	97%
4	02	01	2.15	0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	275	Paket	275	3,131,230,000	5	577,500,000	5	577,500,000	5	821,230,000	5	577,500,000	5	577,500,000	5	316,111,572	5	545,875,000	6	779,915,000	100%	55%	######	95%	######	95%
4	02	01	2.15	0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55	Orang	55	547,125,000	55	102,850,000	55	102,850,000	55	135,725,000	55	102,850,000	55	102,850,000	55	83,396,000	50	116,945,000	45	104,913,750	100%	81%	91%	######	82%	77%
4	02	01	2.2			Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	100	Persen	70	6,698,995,000	100	1,339,799,000	100	1,339,799,000	100	1,339,799,000	100	1,339,799,000	###	1,339,799,000	100	1,164,277,405	100	972,925,490	100	1,456,844,750	100%	87%	######	73%	######	109%
4	02	01	2.2	0001		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	1	50,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000		-			55	9,900,000	0%	0%	0%	0%	######	99%
4	02	01	2.2	0002		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12	Laporan	12	2,788,500,000	12	557,700,000	12	557,700,000	12	557,700,000	12	557,700,000	12	557,700,000	12	457,073,000	12	462,299,000	12	464,166,000	100%	82%	######	83%	######	83%
4	02	01	2.2	0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	25	Laporan	25	3,860,495,000	20	772,099,000	20	772,099,000	20	772,099,000	20	772,099,000	20	772,099,000	25	707,204,405	20	510,626,490	20	982,778,750	125%	92%	######	66%	######	127%
4	2	2			Meningkatnya Pelayanan dan Fasilitasi dalam Kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100	Persen	100	73,426,702,770	100	13,099,061,000	100	13,099,061,000	100	21,030,458,770	100	13,099,061,000	###	13,099,061,000	100	24,254,965,505	100	23,898,864,557	100	23,564,541,843	100%	######	######	182%	######	112%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	2	2	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	100	%	100	8,503,522,260	100	1,524,606,000	100	1,524,606,000	100	2,405,098,260	100	1,524,606,000	###	1,524,606,000	100	3,537,381,259	100	3,076,746,380	100	3,580,464,315	100%	#####	#####	202%	#####	149%
4	2	2	2.01	0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15	Dokumen	15	1,900,972,400	8	300,000,000	8	300,000,000	8	700,972,400	8	300,000,000	8	300,000,000	16	552,600,504	10	411,222,973	11	602,529,960	200%	#####	#####	######	#####	86%
4	2	2	2.01	0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15	Dokumen	15	4,855,671,360	8	1,000,000,000	8	850,000,000	8	1,305,671,360	8	850,000,000	8	850,000,000	16	2,286,120,497	10	2,283,025,577	13	2,481,057,353	200%	#####	#####	######	#####	190%
4	2	2	2.01	0003		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	Dokumen	1	496,878,500	1	104,606,000	1	104,606,000	1	78,454,500	1	104,606,000	1	104,606,000	1	5,656,988	-	-	2	156,126,302	100%	5%	0%	0%	#####	199%
4	2	2	2.01	0004		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	Dokumen	4	600,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	8	693,003,270	5	382,497,830	1	88,670,700	400%	#####	#####	######	50%	74%
4	2	2	2.01	0005		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	Dokumen	-	300,000,000	-	-	1	150,000,000	1	150,000,000	-		-						1	252,080,000	0%	0%	0%	0%	#####	168%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
											2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	02	2	0006		Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				-	-	Orang	-	280	50,000,000	280	150,000,000	###	150,000,000							0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	2	2	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan	100 %	100	11,180,492,260	100	2,050,000,000	100	2,050,000,000	100	2,980,492,260	100	2,050,000,000	###	2,050,000,000	100	3,496,294,474	100	3,426,631,326	100	4,174,951,163		####		167%		140%
4	2	2	2.02	0001		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2	1,106,664,127	2	200,000,000	2	200,000,000	2	306,664,127	2	200,000,000	2	200,000,000	2	287,228,500	2	264,140,252	2	537,593,457	100%	####	####	#####	####	175%
4	2	2	2.02	0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2	1,106,664,127	2	200,000,000	2	200,000,000	2	306,664,127	2	200,000,000	2	200,000,000	2	298,865,400	2	270,414,290	2	410,928,715	100%	####	####	#####	####	134%
4	2	2	2.02	0003		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1	2,706,664,127	1	500,000,000	1	500,000,000	1	706,664,127	1	500,000,000	1	500,000,000	1	1,037,493,174	1	1,020,612,370	1	737,151,898	100%	####	####	#####	####	104%
4	2	2	2.02	0004		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1	2,706,664,127	1	500,000,000	1	500,000,000	1	706,664,127	1	500,000,000	1	500,000,000	1	778,018,600	1	855,834,414	1	1,146,918,610	100%	####	####	#####	####	162%
4	2	2	2.02	0005		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1	856,664,127	1	150,000,000	1	150,000,000	1	256,664,127	1	150,000,000	1	150,000,000	1	262,896,300	1	245,982,500	1	212,665,900	100%	####	####	#####	####	83%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	2	2	2.02	0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dokumen	1	2,697,171,625	1	500,000,000	1	500,000,000	1	697,171,625	1	500,000,000	1	500,000,000	1	831,792,500	1	769,647,500	1	1,129,692,583	100%	#####	#####	######	#####	162%
4	2	2	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	100	%	100	9,410,478,000	100	1,885,561,000	100	1,885,561,000	100	1,868,234,000	100	1,885,561,000	###	1,885,561,000	100	2,683,402,266	100	2,458,892,712	100	3,041,905,636	100%	#####	#####	130%	#####	163%
4	2	2	2.03	0001		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	28	Laporan	28	1,750,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	21	550,826,272	13	425,642,131	13	576,374,066	162%	#####	#####	######	#####	165%
4	2	2	2.03	0002		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	28	Laporan	28	1,750,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	20	575,064,000	11	402,836,074	13	581,245,510	154%	#####	85%	######	#####	166%
4	2	2	2.03	0003		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	28	Laporan	28	1,750,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	17	506,163,752	13	567,433,139	13	683,837,695	131%	#####	#####	######	#####	195%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	2	2	2.03	0004		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	28	Laporan	28	1,750,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	13	350,000,000	22	558,022,042	12	513,213,888	13	497,501,039	169%	#####	92%	######	#####	142%
4	2	2	2.03	0006		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2	Dokumen	2	153,318,000	2	34,129,000	2	34,129,000	2	16,802,000	2	34,129,000	2	34,129,000	1	6,316,000	2	5,509,450	2	7,196,250	50%	19%	#####	16%	#####	43%
4	2	2	2.03	0007		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Dokumen	1	750,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	7	160,989,100	2	160,065,680	2	155,240,250	350%	#####	#####	######	#####	103%
4	2	2	2.03	0008		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Laporan	1	1,507,160,000	1	301,432,000	1	301,432,000	1	301,432,000	1	301,432,000	1	301,432,000	1	326,021,100	1	384,192,350	1	540,510,826	100%	#####	#####	######	#####	179%
4	2	2	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD	100	%	100	11,695,000,000	100	2,339,000,000	100	2,339,000,000	100	2,339,000,000	100	2,339,000,000	###	2,339,000,000	100	4,631,851,677	100	5,133,861,483	100	5,145,575,347	100%	#####	#####	219%	#####	220%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	02	02	2.04	0001		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	Dokumen	-	140,000,000		-	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000		-			55	485,056,450	0%	0%	0%	0%	####	#####
4	2	2	2.04	0002		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	13	Dokumen	13	7,360,000,000	8	1,500,000,000	8	1,465,000,000	8	1,465,000,000	8	1,465,000,000	8	1,465,000,000	13	2,346,546,626	11	2,295,571,383	12	2,509,883,807	163%	####	####	#####	####	171%
4	2	2	2.04	004		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7	Orang	7	140,000,000	8	28,000,000	8	28,000,000	8	28,000,000	8	28,000,000	8	28,000,000	-	-	-	-	4	41,909,580	0%	0%	0%	0%	50%	150%
4	2	2	2.04	005		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96	Orang	96	1,680,000,000	96	336,000,000	96	336,000,000	96	336,000,000	96	336,000,000	96	336,000,000	96	258,000,000	96	595,200,000	96	637,440,000	100%	77%	####	#####	####	190%
4	2	2	2.04	006		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	12	300,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	23	63,550,000	17	76,040,000	13	24,470,000	575%	####	####	#####	####	41%
4	2	2	2.04	007		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokumen	1	75,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	02	02	2	0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	80	Dokumen	20	2,000,000,000	80	400,000,000	80	400,000,000	80	400,000,000	80	400,000,000	80	400,000,000	385	1,963,755,051	468	2,167,050,100	500	1,446,815,510	481%	####	####	#####	####	362%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	2	2	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	100	%	100	23,629,036,300	100	3,435,812,000	100	3,435,812,000	100	9,585,788,300	100	3,585,812,000	###	3,585,812,000	100	8,660,351,620	100	8,822,847,600	100	6,025,109,800	100%	####	####	257%	####	63%
4	2	2	2.05	0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45	Laporan	45	750,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	9	150,000,000	10	71,060,000	8	59,160,000	33	55,270,000	111%	47%	89%	39%	####	37%
4	2	2	2.05	0002		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55	Dokumen	55	175,000,000	55	35,000,000	55	35,000,000	55	35,000,000	55	35,000,000	55	35,000,000	55	9,354,600	55	24,079,050	55	25,859,600	100%	27%	####	69%	####	74%
4	2	2	2.05	0003		Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165	Dokumen	165	22,354,036,300	55	3,250,812,000	55	3,250,812,000	55	9,350,788,300	55	3,250,812,000	55	3,250,812,000	160	8,579,937,020	161	8,739,608,550	109	5,943,980,200	291%	####	####	#####	####	64%
4	02	02	2.1	0004		Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	Orang		350,000,000		-	-		100	50,000,000	100	150,000,000	###	150,000,000		-					0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	2	2	2.06			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD	100	%	100	1,771,483,950	100	296,744,000	100	446,744,000	100	434,507,950	100	296,744,000	###	296,744,000	100	150,186,100	100	142,711,905	100	673,017,550		51%		32%		155%
4	2	1	2.06	0001		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	Dokumen	-	300,000,000		-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	-	-	-					1	462,959,300	0%	0%	0%	0%	####	309%
4	2	2	2.06	0002		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7	Laporan	7	1,471,483,950	7	296,744,000	7	296,744,000	7	284,507,950	7	296,744,000	7	296,744,000	8	150,186,100	7	142,711,905	6	210,058,250	114%	51%	####	48%	86%	74%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
												2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	2	2	2.07			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi	100	%	100	1,281,350,000	100	256,270,000	100	256,270,000	100	256,270,000	100	256,270,000	###	256,270,000	100	202,162,899	100	307,355,002	100	21,189,750	100%	79%	####	120%	####	8%
4	2	2	2.07	0001		Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	jumlah laporan fasilitas, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama dearah	-	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	2	2	2.07	0002		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48	Dokumen	48	1,281,350,000	48	256,270,000	48	256,270,000	48	256,270,000	48	256,270,000	48	256,270,000	545	202,162,899	859	307,355,002	76	21,189,750	1135%	79%	####	#####	####	8%
4	2	2	2.08			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi	100	%	100	5,955,340,000	1	1,311,068,000	1	1,161,068,000	1	1,161,068,000	1	1,161,068,000	1	1,161,068,000	100	893,335,210	100	529,818,149	100	902,328,282	######	68%	####	46%	####	78%
4	2	2	2.08	0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	31	Dokumen	31	3,400,000,000	13	1,000,000,000	13	600,000,000	13	600,000,000	13	600,000,000	13	600,000,000	30	699,751,730	8	325,009,666	8	400,309,072	231%	70%	62%	54%	62%	67%
4	2	2	2.08	0002		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1	Laporan	1	75,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000			-	-	1	14,250,000	0%	0%	0%	0%	####	95%
4	2	2	2.08	0003		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3	Dokumen	3	1,480,340,000	36	296,068,000	36	296,068,000	36	296,068,000	36	296,068,000	36	296,068,000	25	193,583,480	36	168,950,550	30	215,903,460	69%	65%	####	57%	83%	73%

Kode Rekening					Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
											2022		2023		2024		2025		2026		2022		2023		2024		2022		2023		2024	
4	2	2	2.1	0004		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	- Dokumen	-	1,000,000,000		-	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000			14	35,857,933	14	271,865,750	0%	0%	####	14%	####	109%

Sumber: Data Sekretariat DPRD, Tahun 2025.

2.1.4. Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD

Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya:

a. Anggota DPRD: Sekretariat DPRD menyediakan dukungan penuh mulai dari administrasi, keuangan, kesekretariatan, tenaga ahli, hingga fasilitasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD;
b. Pimpinan dan Fraksi DPRD: Sekretariat DPRD memberikan pelayanan dan fasilitasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dan fraksi dalam menjalankan program kerja dan fungsi pengawasan;
c. Masyarakat: Sekretariat DPRD berfungsi untuk memberikan akses informasi dan melayani masyarakat terkait kegiatan dan kebijakan DPRD;
d. Instansi pemerintah lainnya: Sekretariat DPRD menjalin koordinasi dan pelayanan dengan instansi pemerintah lain dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan DPRD.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Penelaahan RPJMN 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 terdapat langkah strategi pembangunan Indonesia untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut, diantaranya:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mendukung delapan prioritas Nasional Sekretariat DPRD berupaya memberikan dukungan terhadap penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

2.2.2. Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi

Dalam rangka analisis permasalahan perangkat daerah di Tingkat Kabupaten/Kota seharusnya juga melakukan telaahan atas Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi relevan. Hal ini sangat penting dalam rangka perangkat daerah Kabupaten/Kota mengidentifikasi isu-isu strategis, khususnya yang bersumber dari kedua lembaga tersebut.

Adapun lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah Sekretariat Jendral DPR RI di Tingkat Kementerian/ Lembaga dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Tingkat Provinsi. Namun demikian, ketika lembaga tersebut tidak memiliki hubungan hirarkis, masing-masing berdiri sendiri, sehingga kinerja satu lembaga tidak secara langsung mempengaruhi kinerja lembaga lain.

Berdasarkan posisi kelembagaan yang demikian tersebut, maka muatan sasaran jangka menengah dalam Renstra Sekretariat Jendral DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tidak relevan dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, telaahan atas Renstra kedua Lembaga tersebut tidak dilakukan dalam tahap analisis isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

2.2.3. Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Seiring tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD mempunyai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, maka dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Misi ke-3 (Tiga) yaitu " Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel" dengan tujuan RPJMD "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ".

Dari rumusan diatas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan "Meningkatnya fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD".

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Dalam pembentukan peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan singkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses penetapan produk hukum daerah yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat.

Agar terwujud suatu pelayanan yang maksimal bagi lembaga DPRD Kabupaten Bandung dan penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang DPRD berjalan efektif, maka dibutuhkan suatu strategi dimana seluruh kegiatan, pelaksanaan kinerja dan Sekretariat DPRD dilaksanakan secara optimal, terprogram, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, hal dimaksud ditempuh melalui peningkatan kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang dilakukan antara

lain melalui kegiatan penyerapan aspirasi, kunjungan kerja, studi komparasi, bimbingan teknis/diklat, seminar dan lain sebagainya, khusus yang ada relevansinya dengan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD. Selain itu, diperlukan dukungan administrasi serta fasilitasi sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran kegiatan DPRD dalam bentuk input,output, dan outcome yang optimal, antara lain melalui Fasilitasi penyelenggaraan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda DPRD dengan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Administrasi baik bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalammya kinerja Sekretariat DPRD, diselenggarakan sesuai tatanan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempuyai tugas memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang salah satunya sebagai lembaga pembentuk produk hukum daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Pembahasan RTRW dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bandung merupakan dokumen yang sangat penting menjadi rujukan bagi perangkat daerah di Kabupaten Bandung dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. Dalam penyusunan Renstra, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung juga melakukan telaahan KLHS Kabupaten Bandung. Namun, karena tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

yang hanya berfokus pada pemberian layanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Bandung, maka tidak terdapat isu signifikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung terkait dokumen KLHS tersebut.

2.2.6. Permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD sangat terkait dengan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagai unsur pendukung administrasi dan operasional, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota DPRD.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD senantiasa berupaya meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan DPRD. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem administrasi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan fasilitasi pelayanan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.7 Permasalahan Pokok dan Akar Masalah

Permasalahan Pokok	Kondisi Eksisting 2024 (realisasi indikator)	Akar Masalah/ Penyebab	VISI/MISI		TUJUAN	SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR TUJUAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	17 PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN	PHTC	TEMA/ISU PEMBANGUNAN (SE No. 900.1.1/640/SJ)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PD PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
																					UTAMA	PENDUKUNG	
			1	Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Meningkatnya Fasilitasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				a.	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			Persen										
1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, karena kendala prosedur formal pembahasan DPRD tidak ditempuh dengan baik		1. Dalam setiap penyusunan Perda, pembahasan tidak dapat dilakukan dengan optimal, karena tidak dilengkapi dokumen naskah akademik, pewaktuan yang terbatas dalam pembahasan Perda serta belum dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Ham, sehingga Perda yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi				1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bandung secara Tepat Waktu			a.	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu	Persen	1. Program Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital			i			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	
1. Belum Optimalnya Realisasi Pelaksanaan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, karena tidak semua usulan dari Anggota DPRD yang dapat diakomodir pelaksanaannya		1. Belum optimalnya sistem seleksi usulan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga terdapat usulan yang tidak terakomodir walaupun telah diusulkan berulang-ulang oleh DPRD									b.	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen									
			2		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi	2.1	Nilai AKIP	Nilai AKIP			a.	Nilai AKIP	Poin							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRD		
						2.2	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik			b.	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Persen										

Sumber: Data Sekretariat DPRD, Tahun 2025.

Tabel. 2.8

Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Koordinasi Pembahasan Rapat DPRD dengan Mitra Kerja Belum Optimal	Keterlambatan materi/dokumen untuk bahan pembahasan	Belum adanya kebijakan atau SOP terkait dengan Standar mekanisme Pembahasan Rapat dengan Mitra Kerja
2.	Pelaksanaan Penjadwalan Kegiatan Belum Optimal	Banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga terjadi keterlambatan	Belum adanya ketersedian media/instrument/ alat kontrol yang memadai dalam memonitor pelaksanaan kegiatan
3.	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Belum Optimal	Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan	Belum adanya inovasi teknologi dalam menjembatani aspirasi masyarakat ke DPRD, sehingga dapat memudahkan penyampaian aspirasi.
4.	Proses Pengambilan Keputusan DPRD belum efektif dan efisien	Dinamika politik yang berkembang sangat cepat, ikut mempengaruhi kelancaran pengambilan keputusan	Belum adanya sarana/instrument teknologi yang dapat membantu mempermudah mekanisme pengambilan keputusan

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

2.2.7. Isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, karena kendala prosedur formal pembahasan DPRD.
2. Belum Optimalnya Realisasi Pelaksanaan Usulan Pokok-Pokok Pikiran

DPRD, karena tidak semua usulan dari Anggota DPRD yang dapat diakomodir pelaksanaannya.

3. Fasilitas dan Sarana Prasarana yang ada masih kurang mendukung tugas-tugas kedewanan.

Tabel 2.9 Isu Strategis Sekretariat DPRD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pembahasan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, karena kendala prosedur formal pembahasan DPRD tidak ditempuh dengan baik	Dalam setiap penyusunan Perda, pembahasan tidak dapat dilakukan dengan optimal, karena tidak dilengkapi dokumen naskah akademik, pewaktuan yang terbatas dalam pembahasan Perda serta belum dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Ham, sehingga Perda yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi			Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi Perumusan Penyusunan Peraturan Daerah yang Komprehensif

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum Optimalnya Realisasi Pelaksanaan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, karena tidak semua usulan dari Anggota DPRD yang dapat diakomodir pelaksanaannya	Belum optimalnya sistem seleksi usulan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga terdapat usulan yang tidak terakomodir walaupun telah diusulkan berulang-ulang oleh DPRD			Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi Sistem Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Adapun Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”. Sedangkan yang menjadi indikator tujuan tersebut adalah Tingkat Kepuasan Masyarakat Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

3.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”. Sedangkan yang menjadi indikator sasaran tersebut adalah Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu.

Hubungan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Masyarakat Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	78.61	80	85	90	95	100	Survey Kepuasan Masyarakat DPRD atas kinerja Sekretariat DPRD
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu	75	80	85	90	95	100	(capaian kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD + Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran + Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD)/4 X 100 %

Sumber: Data Sekretariat DPRD, Tahun 2025.

3.2. Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Strategi dalam Renstra SKPD adalah strategi SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan-keputusan.

Dalam hal pelaksanaan inovasi kelembagaan, Sekretariat DPRD berupaya mengembangkan perangkat teknologi dan informasi dalam menunjang fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Angogota DPRD. Adapun inovasi yang akan menjadi bahan pertimbangan Strategis Sekretariat DPRD adalah inovasi dalam menyiapkan perangkat teknologi dan informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan kemudahan dalam menyampaikan aspirasi ke lembaga DPRD. Dengan demikian Sekretariat DPRD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan akses informasi dan teknologi dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun Pentahapan pencapaian strategi Sekretariat DPRD berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat DPRD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Peningkatan Koordinasi Terkait Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Koordinasi Terkait Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Koordinasi Terkait Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Koordinasi Terkait Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Koordinasi Terkait Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

3.3. Penyajian Lokus Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan layanan Sekretariat DPRD tidak ada lokus spesifik dalam pelaksanaan program fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, karena menyesuaikan dengan pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Sekretariat DPRD difokuskan pada inovasi layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD melalui inovasi teknologi dan informasi. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD berupaya melakukan penataan proses bisnis dan Standar Operating Prosedur (SOP) pada pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Sehingga arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 adalah Penguatan Prosedur Layanan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD, dan Peningkatan dan Penataan Prosedur Penyerapan Aspirasi melalui usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Berikut gambaran arah kebijakan Renstra Sekretariat DPRD antara lain:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4
	Peningkatan Koordinasi Terkait Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Penguatan Prosedur Layanan Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD	
		Peningkatan dan Penataan Prosedur Penyerapan Aspirasi melalui usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana Program sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya. maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
     - 1.1. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
     - 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
     - 1.3.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6. Penyediaan Bahan/Material

1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.2. Pengadaan Mebel

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3. Pemeliharaan Mebel

1.7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

1.8.3. Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD

1.9. Layanan Administrasi DPRD

1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD

1.9.2 Fasilitasi Fraksi DPRD

1.9.3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.1.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD

2.1.6 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS

2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.2.3. Pembahasan APBD

2.2.4. Pembahasan APBD Perubahan

2.2.5. Pembahasan Laporan Semester

2.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

2.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

2.3.5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

2.3.6. Pengawasan Penggunaan Anggaran

2.3.7. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD

2.4.1. Orientasi DPRD

2.4.2. Bimbingan Teknis DPRD

2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

2.4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

2.4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD

2.4.8. Publikasi dan Dokumentasi DPRD

2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

2.5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah

2.5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2.5.3. Pelaksanaan Reses

2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

2.6.1 Penyusunan Kode Etik DPRD

2.6.2 Pengawasan Kode Etik DPRD

2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

2.7.1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

2.8. Fasilitasi Tugas DPRD

2.8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2.8.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.8.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

2.8.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input. output. outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama. penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran. maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menetapkan program. indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut berisi *outcome* maupun *impact* program. Berikut ini merupakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025-2029:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Tepat Waktu				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		Survey Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
		Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu		Persentase Rata-rata capaian kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD + Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran + Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan + Kegiatan Peningkatan Kapasitas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
							DPRD
			Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD		Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi
					Indeks Manajemen Resiko		Indeks Manajemen Resiko
				Tercapainya pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksanaanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya Pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksanaan ya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				wulanan/Semesteran SKPD			
				Tercapainya pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100%
				Terlaksanaanya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksanaanya Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Undangan			
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya jumlah paket bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksanaya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksanaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksanaya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100%

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksanan ya pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Terlaksanan ya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Terlaksanan ya pengadaan Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya pemenuhan laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100%
				Terlaksanan ya penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya pengelolaan BMD dalam kondisi baik	Persentase BMD Dalam kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik) x100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Operasional atau Lapangan			
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya pemenuhan layanan kesejahteraan Anggota DPRD tepat waktu	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	(Jumlah anggota dewan yang mendapatkan pelayanan / jumlah anggota dewan yang ada) x 100%
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
				Terlaksanannya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
				Terlaksanannya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya pemenuhan fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	Layanan Administrasi DPRD	(Jumlah kegiatan administrasi tugas DPRD yang terlaksana/Jumlah fasilitasi Administrasi tugas DPRD) x 100%
				Terlaksanan ya Penyelenggar aan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
				Terlaksanan ya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD
				Terlaksanan ya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penetapan Perda APBD			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	
				Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penetapan Perda APBD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)		Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N
				Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penetapan Ranperda	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)		Persentase Penetapan Ranperda
				Terfasilitasinya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	(Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan/Jumlah Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD) x 100%
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik
				Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksanan ya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
				Meningkatny a Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	(Jumlah Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan / Jumlah Rancangan peraturan kebijakan Anggaran yang dibahas) x100%
				Terlaksanan ya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
				Terlaksanan ya Pembahasan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				KUA dan Perubahan PPAS			
				Terlaksanaanya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
				Terlaksanaanya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan
				Terlaksanaanya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
				Terlaksanaanya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	(Jumlah PD yang diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya /Jumlah PD) X 100%
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Keuangan			
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
				Meningkatnya Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	(Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD / Jumlah Anggota DPRD) X 100%
				Terlaksananya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksanaanya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD
				Terlaksanaanya Penyebarluasan Produk Hukum	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
				Meningkatnya Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	(Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti / Jumlah Aspirasi Mayarakat) x 100%
				Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
				Terlaksanaanya Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
				Meningkatnya Persentase Anggota DPRD yang Diawasi	Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	(Jumlah Anggota dewan yang melaksanakan kode etik - Jumlah Anggota dewan yang terkena kode etik / Jumlah Anggota Dewan) X 100%
				Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi	Pembahasan Kerja Sama Daerah	(Jumlah Publikasi kegiatan DPRD di media resmi/ jumlah kegiatan DPRD) x100%
				Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
				Meningkatnya Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi	Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi	Fasilitasi Tugas DPRD	(Jumlah Kegiatan Pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD/Jumlah seluruh kegiatan pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD) x 100%
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelaksanaan Tugas DPRD			
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
				Terlaksanaya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
				Terlaksanaya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				107,800,230,000.00		125,000,230,000.00		125,000,230,000.00		125,000,230,000.00		125,000,230,000.00	
SEKRETARIAT DPRD				107,800,230,000.00		125,000,230,000.00		125,000,230,000.00		125,000,230,000.00		125,000,230,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1. 71,83 Poin 2. 48,12 Poin	1. 73 2.50	87,805,400,512.00	1. 74 2. 51	87,975,730,000.00	1. 75 2. 52	87,975,730,000.00	1. 76 2. 53	87,564,556,067.00	1. 77 2. 54	87,813,022,100.00	S.3.1
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,10 Poin	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	100	135,000,000.00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	100	12,541,271,000.00	100	12,541,271,000.00	100	12,541,271,000.00	100	12,541,271,000.00	100	12,541,271,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	540 orang/bulan	540	12,456,271,000.00	540	12,456,271,000.00	540	12,456,271,000.00	540	12,456,271,000.00	540	12,456,271,000.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	100	659,500,000.00	100	659,500,000.00	100	659,500,000.00	100	459,500,000.00	100	659,500,000.00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3	107,500,000.00	3	107,500,000.00	3	107,500,000.00	3	107,500,000.00	3	107,500,000.00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	153 Orang	55	302,000,000.00	55	302,000,000.00	55	302,000,000.00	55	102,000,000.00	55	302,000,000.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 Persen	100	1,823,781,762.00	100	1,819,400,000.00	100	1,819,400,000.00	100	1,719,400,000.00	100	1,719,400,000.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16	30,000,000.00	16	30,000,000.00	16	30,000,000.00	16	30,000,000.00	16	30,000,000.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69 Paket	69	200,000,000.00	69	200,000,000.00	69	200,000,000.00	69	200,000,000.00	69	200,000,000.00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	18	180,000,000.00	18	180,000,000.00	18	180,000,000.00	18	180,000,000.00	18	180,000,000.00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	10	84,000,000.00	10	84,000,000.00	10	84,000,000.00	10	84,000,000.00	10	84,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	15	250,000,000.00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	126 Dokumen	6	300,000,000.00	6	300,000,000.00	6	300,000,000.00	6	300,000,000.00	6	300,000,000.00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	1	25,400,000.00	1	25,400,000.00	1	25,400,000.00	1	25,400,000.00	1	25,400,000.00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	554,381,762.00	12	550,000,000.00	12	550,000,000.00	12	450,000,000.00	12	450,000,000.00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	250,000,000.00	100	50,000,000.00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0		0		0		0	150,000,000.00	0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0		0		0		0	50,000,000.00	0		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	4,498,111,000.00	100	4,706,905,050.00	100	4,706,905,050.00	100	4,413,059,067.00	100	4,661,525,100.00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	486,905,050.00	12	486,905,050.00	12	486,905,050.00	12	486,905,050.00	12	486,905,050.00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	3,991,205,950.00	12	4,200,000,000.00	12	4,200,000,000.00	12	3,906,154,017.00	12	4,154,620,050.00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	80 Persen	80	1,142,372,000.00	80	867,022,000.00	80	867,022,000.00	80	867,022,000.00	80	867,022,000.00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	0 Unit	0	464,850,000.00	0	-	0	-	0	100,000,000.00	5	-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dibayarkan Pajaknya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20	456,622,000.00	20	456,622,000.00	20	456,622,000.00	20	356,622,000.00	20	456,622,000.00	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	50	15,000,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	64	145,400,000.00	64	145,400,000.00	64	145,400,000.00	64	145,400,000.00	64	145,400,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3	50,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6	10,500,000.00	6	100,000,000.00	6	100,000,000.00	6	100,000,000.00	6	100,000,000.00	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu	100 Persen	100	65,615,565,750.00	100	65,839,505,000.00	100	65,839,505,000.00	100	65,839,505,000.00	100	65,839,505,000.00	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	659 Orang/Bulan	660	64,775,505,000.00	660	64,775,505,000.00	660	64,775,505,000.00	660	64,775,505,000.00	660	64,775,505,000.00	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	5	577,500,000.00	5	800,000,000.00	5	800,000,000.00	5	800,000,000.00	5	800,000,000.00	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	55	262,560,750.00	55	264,000,000.00	55	264,000,000.00	55	264,000,000.00	55	264,000,000.00	
Layanan Administrasi DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD	100 Persen	100	1,339,799,000.00	100	1,357,126,950.00	100	1,357,126,950.00	100	1,339,799,000.00	100	1,339,799,000.00	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	55 Dokumen	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12	557,700,000.00	12	557,700,000.00	12	557,700,000.00	12	557,700,000.00	12	557,700,000.00	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	20 Laporan	20	772,099,000.00	20	789,426,950.00	20	789,426,950.00	20	772,099,000.00	20	772,099,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Persentase Anggota DPRD yang Mendapatkan Dukungan Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	1. 100 2.100 3.100 4.100	1. 80 2. 80 3. 80 4. 80	19,994,829,488.00	1. 85 2. 85 3. 85 4. 85	37,024,500,000.00	1. 90 2. 90 3. 90 4. 90	37,024,500,000.00	1. 95 2. 95 3. 95 4. 95	37,435,673,933.00	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	37,187,207,900.00	S.3.1
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan	100 Persen	100	2,853,295,000.00	100	10,918,432,067.00	100	10,918,432,067.00	100	11,279,606,000.00	100	11,279,606,000.00	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	11 Dokumen	8	300,000,000.00	8	800,000,000.00	8	800,000,000.00	8	800,000,000.00	8	800,000,000.00	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13 Dokumen	8	2,103,689,000.00	8	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00	8	3,000,000,000.00	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	1	104,606,000.00	1	304,606,000.00	1	304,606,000.00	1	304,606,000.00	1	304,606,000.00	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	2	195,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0	-	0	50,000,000.00	0	50,000,000.00	1	50,000,000.00	0	50,000,000.00	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0 Orang	100	150,000,000.00	100	6,513,826,067.00	100	6,513,826,067.00	100	6,875,000,000.00	100	6,875,000,000.00	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan	100 Persen	100	2,707,951,088.00	100	5,700,000,000.00	100	5,700,000,000.00	100	5,700,000,000.00	100	5,700,000,000.00	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2	263,984,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2	575,023,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1	500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1	590,560,888.00	1	1,500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	1	1,500,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1	253,254,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1	525,129,200.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya	100 Persen	100	2,691,550,000.00	100	2,850,000,000.00	100	2,850,000,000.00	100	2,850,000,000.00	100	2,850,000,000.00	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	13 Laporan	13	465,719,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	13 Laporan	13	483,493,200.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13 Laporan	13	498,700,900.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	13 Laporan	13	547,699,400.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	13	500,000,000.00	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	2	153,363,300.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1	392,574,200.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen	100	3,269,565,900.00	100	4,973,466,033.00	100	4,973,466,033.00	100	4,973,466,033.00	100	4,775,000,000.00	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	55 Dokumen	1	35,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	1	500,000,000.00	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	8	2,147,245,900.00	8	2,500,000,000.00	8	2,500,000,000.00	8	2,500,000,000.00	8	2,500,000,000.00	
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	8	28,000,000.00	8	110,000,000.00	8	110,000,000.00	8	110,000,000.00	8	110,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang	96	584,320,000.00	96	650,000,000.00	96	650,000,000.00	96	650,000,000.00	96	650,000,000.00	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	13 Dokumen	17	60,000,000.00	17	198,466,033.00	17	198,466,033.00	17	198,466,033.00	17	\	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 Dokumen	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	500 Dokumen	80	400,000,000.00	80	1,000,000,000.00	80	1,000,000,000.00	80	1,000,000,000.00	80	1,000,000,000.00	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti	100 Persen	100	6,573,427,500.00	100	10,223,427,500.00	100	10,223,427,500.00	100	10,223,427,500.00	100	10,223,427,500.00	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	9	150,000,000.00	9	150,000,000.00	9	150,000,000.00	9	150,000,000.00	9	150,000,000.00	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	55 Dokumen	55	35,000,000.00	55	35,000,000.00	55	35,000,000.00	55	35,000,000.00	55	35,000,000.00	
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	109 Dokumen	55	6,238,427,500.00	55	9,738,427,500.00	55	9,738,427,500.00	55	9,738,427,500.00	55	9,738,427,500.00	
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0 Orang	55	150,000,000.00	55	300,000,000.00	55	300,000,000.00	55	300,000,000.00	55	300,000,000.00	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD	100 Persen	100	296,744,000.00	100	296,744,000.00	100	296,744,000.00	100	346,744,000.00	100	296,744,000.00	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000.00	0		
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan	7	296,744,000.00	7	296,744,000.00	7	296,744,000.00	7	296,744,000.00	7	296,744,000.00	
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi	100 Persen	100	256,270,000.00	100	256,270,000.00	100	256,270,000.00	100	256,270,000.00	100	256,270,000.00	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	76 Dokumen	48	256,270,000.00	48	256,270,000.00	48	256,270,000.00	48	256,270,000.00	48	256,270,000.00	
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi	100 Persen	100	1,346,026,000.00	100	1,806,160,400.00	100	1,806,160,400.00	100	1,806,160,400.00	100	1,806,160,400.00	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	13	600,000,000.00	13	600,000,000.00	13	600,000,000.00	13	600,000,000.00	13	600,000,000.00	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1	15,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	30 Dokumen	3	296,068,000.00	3	396,068,000.00	3	396,068,000.00	3	396,068,000.00	3	396,068,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen	7	434,958,000.00	7	760,092,400.00	7	760,092,400.00	7	760,092,400.00	7	760,092,400.00	

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Keterangan:

S.3.1 =Program/Kegiatan/Subkegiatan yang mendukung sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 Meningkatnya kualita birokrasi yang lebih transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD terdapat program prioritas DPRD yang menunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	R28
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			Pembahasan KUA dan PPAS	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Pembahasan APBD	
			Pembahasan APBD Perubahan	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Pendalaman Tugas DPRD	
			Pelaksanaan Reses	

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Keterangan:

R28 : Subkegiatan dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Paham Digitalisasi Serta Mengoptimalkan Tata Kelola Big Data dan Transformasi Dgital.

4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi bersangkutan. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD merupakan penjabaran perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan, baik skala nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat DPRD memiliki kesinambungan dengan dokumen daerah terkait, salah satunya yaitu RPJMD. Dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD mampu membantu pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Bandung, sehingga Sekretariat DPRD menentukan target kinerja dalam konteks pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	78.61	80	85	90	95	100	Survey Kepuasan Masyarakat DPRD atas kinerja Sekretariat DPRD

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	78.61	80	85	90	95	100	Survey Kepuasan Masyarakat DPRD atas kinerja Sekretariat DPRD

Sumber: Data Sekretariat DPRD Tahun 2025

4.4. Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tahun 2025-2029

Sekretariat DPRD mengampu pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan Kesetaraan Gender (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan). Adapun indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sekretariat DPRD antara lain:

Tabel 4.6
Target Indikator TPB/SDGs Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Goals	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TBP 5 (Kesetaraan Gender)	5.5.1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat. parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	
2	TBP 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh)	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	

Sumber: RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, 2025.

4.5. Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD tidak memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap tematik pembangunan Tahun 2025-2029.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan implementasi Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung;
2. Dekumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam satu periode perencanaan; dan
3. Renstra Sekretariat DPRD ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetensi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan, maka penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun

2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Bandung, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului pengendalian dan evaluasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 akan dilakukan pengendalian dan evaluasi menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Soreang, September 2025

SEKRETARIS DPRD

ttd

YOSEP NUGRAHA

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Nomor				Halaman
1.	Tabel 2.1	:	Klasifikasi Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	23
2.	Tabel 2.2	:	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Sekretariat DPRD.....	24
3.	Tabel 2.3 (T-C.23)	:	Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.....	26
4	Tabel 2.4	:	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung....	28
5	Tabel 2.5	:	Rekapitulasi Hasil Monev SDG'S Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024	29
6	Tabel 2.6	:	Hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan (capaian hingga tahun 2024)	32
7	Tabel 2.7	:	Permasalahan Pokok dan Akar Masalah	52
8	Tabel 2.8	:	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	53
9	Tabel 2.9	:	Isu Strategis Sekretariat DPRD	55
10	Tabel 3.1	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ..	58
11	Tabel 3.2	:	Penahapan Renstra Sekretariat DPRD	59
12	Tabel 3.3	:	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	61
13	Tabel 4.1	:	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD	67
14	Tabel 4.2	:	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung	99
15	Tabel 4.3	:	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	107

16	Tabel 4.4	:	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	108
17	Tabel 4.5	:	Indikator Kinerja Kunci	108
18	Tabel 4.6	:	Indikator TPB/SDGs	109

DAFTAR GAMBAR

Nomor				Halaman
1.	Gambar 2.1	:	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ..	19